



Anggaran Penanganan Sampah Jadi Rp 20 M

Dewan: Belum Maksimal dan Tak Kunjung Selesai

JOGJA - Anggaran pengelolaan sampah di Kota Jogja diketahui membengkak menjadi Rp 20 miliar pasca penerapan desentralisasi sampah. Meskipun demikian, legislator menilai penggunaan anggaran sebesar itu masih belum optimal untuk menangani persoalan sampah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuriadijaya mengatakan, saat masih berfungsinya TPA Piyungan dengan sistem *open dumping* pemerintah hanya mengeluarkan anggaran Rp 4 miliar. Jumlah itu dihitung dari pembuangan sampah sebesar Rp 78 ribu per ton.

Itu pun diakui pemerintah kewalahan. Sebab pemasukan anggaran dari retribusi sampah hanya Rp 3 miliar

per ton. Sehingga masih ada defisit anggaran Rp 1 miliar.

Aman menyebut, anggaran semakin membengkak pasca berlakunya desentralisasi sampah. Sebab kini pemkot harus mengeluarkan Rp 20 miliar untuk pengelolaan 200 ton sampah. Lantaran biaya pengelolaan sampah berubah menjadi Rp 450 ribu per ton.

"Sementara target retribusi kami dengan sistem desentralisasi hanya Rp 6 miliar. Tetapi belanja untuk sampah nilainya Rp 20 miliar," ujar Aman kemarin (8/8).

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat ikut berperan dalam upaya mengurangi produksi sampah. Agar kemudian penggunaan anggaran pengelolaan yang membengkak hingga puluhan miliar itu bisa direduksi.

Aman pun menyatakan, upaya yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan dengan mengolah sampah dari

rumah tangga. Selain itu juga dapat memaksimalkan sampah anorganik melalui 678 bank sampah di Kota Jogja, sehingga beban TPS3R maupun depo bisa berkurang.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono menilai, pemkot belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Meski sudah digelontorkan anggaran puluhan miliar, permasalahan sampah tidak kunjung selesai.

Menurut Sigit, tidak optimalnya penggunaan anggaran oleh pemkot juga nampak dari masih penuhnya depo serta maraknya pembuangan sampah liar. Kondisi itu akibat tidak akuratnya data sampah di kota ini. Sehingga alokasi anggaran pun tidak optimal untuk menangani masalah.

"Kinerjanya memang saya nilai belum maksimal dengan daya dukung anggaran

sebesar itu. Kami di dewan sebenarnya tidak masalah anggarannya sebesar apa, tapi yang penting selesai. Ini tidak selesai-selesai," tegas anggota Fraksi Partai Nasdem ini.

Sigit juga mendesak gar Pemkot Jogja bisa terbuka perihal kemampuan pengelolaan sampah. Apabila memang tidak mampu, lebih baik sampaikan tidak mampu. Agar nantinya bisa dicarikan solusi oleh Pemprov DIJ.

"Dia menegaskan, sinergitas antarpemerintah merupakan salah satu kunci pengelolaan sampah di Kota Jogja. Sebab diakui kondisi di Kota Jogja yang memiliki keterbatasan lahan memang tidak bisa optimal jika harus melakukan pengalihan kemampuan pengelolaan sampah. "Kalau tidak mampu terus dipaksakan saya yakin hasilnya tidak akan maksimal. Kuncinya sinergi dengan dengan kabupaten yang lain," ungkap Sigit. (**inu/laz/er**)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005